

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu sektor bidang perdagangan yang di kelola oleh perorangan maupun badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis yang cukup besar di saat sektor yang lain nya berjatuh hanya usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang tetap berdiri kokoh. Daya tahan UMKM terhadap krisis ini menjadikan UMKM sebagai asset berharga bagi keberlangsungan perekonomian.

Tabel 1. Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia tahun 2010-2018

No	Tahun	Jumlah Unit
1	2018	64.194.057
2	2017	62.922.617
3	2016	61.651.177
4	2015	59.262.772
5	2014	57.895.721
6	2013	56.534.592
7	2012	55.206.444
8	2011	54.114.821
9	2010	53.823.732

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa dalam Sembilan tahun terakhir, jumlah usaha mikro kecil dan menengah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Karena UMKM yang digadang sebagai salah satu sektor yang sangat berkontribusi penting untuk memajukan perekonomian

Indonesia, maka pemerintah dengan gencar terus mendorong peningkatan jumlah UMKM dengan cara pemerintah berupaya menjamin kemudahan dalam perijinan dan pendanaan bagi para pelaku UMKM.

Perilaku manajemen keuangan di anggap sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. dalam (Humaira & Sagoro, 2018) mengusulkan perilaku manajemen keuangan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Amanah et al, (2016) menginterpretasikan perilaku manajemen keuangan adalah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam mengelola keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu tersebut. Seringkali kegagalan seseorang dalam mengelola keuangan dan mensejahterakan dirinya sendiri bukan disebabkan karena rendahnya pendapatan, tetapi lebih ke pada pengelolaan keuangan dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku Umkm tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan nya dalam manajemen usahanya, terbukti berdasarkan survey yang di lakukan (Humaira & Sagoro, 2018) kebanyakan pelaku usaha tidak membuat pembukuan. Artinya banyak pelaku usaha mengabaikan pentingnya mempersiapkan penganggaran untuk keberlangsungan usaha mereka. Sebaiknya mereka melakukan pembukuan seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan agar memperoleh dana tambahan dari pihak eksternal.

literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan dalam hal produk lembaga jasa keuangan. Rahayu yani, (2017) literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang srategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha. Rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM mengenai produk jasa keuangan membuat hanya sedikit pelaku UMKM yang mengetahui tentang lembaga jasa keuangan tersebut. Hal ini di karenakan mereka kurang mengerti apa itu lembaga jasa keuangan dan apa saja jenis produk yang di tawarkan oleh lembaga tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat di katakan bahwa perilaku manajemen keuangan para

pelaku UMKM sangat sesuai dengan hasil survey nasional yang di lakukan oleh Otoritas (2016) tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya sebesar 29,66 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya dari ratusan juta penduduk Indonesia hanya terdapat 29,66 persen memahami literasi keuangan. Hasil survey OJK menyatakan bahwa kelompok UMKM di Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan hanya sebesar 15,68%.

Istilah financial inclusion atau inklusi keuangan menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid dari tahun 2011 hingga tahun 2014, 700 juta orang menjadi pemilik baru rekening di bank, lembaga keuangan lainnya, dan penyedia layanan mobile money. Data terkini juga menunjukkan bahwa hanya ada 36% atau sekitar 90 juta masyarakat dewasa Indonesia yang memiliki rekening di bank (Klapper et al, 2017). Jumlah ini tertinggal jauh dari Malaysia yang mencapai 81%, China 79%, India 53% (Klapper et al, 2017). Definisi dari inklusi keuangan menurut *World Bank* dan *European Commission* adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan entah dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan mampu melakukan perubahan dalam pola berpikir para pelaku ekonomi dalam melihat uang dan keuntungan (Sanistasya et al, 2018). Serupa dengan perkembangan yang terjadi di dunia, inklusi keuangan juga mengalami perkembangan di Indonesia menurut Global Findex (Global Financial Inclusion Database) 2017, kepemilikan rekening (formal account) di Indonesia (15 tahun keatas) hanya 49 persen, tabungan (formal saving) sebesar 20 persen, dan formal credit sebesar 18 persen. Presentase inklusi keuangan di Indonesia masih di bawah Negara-negara lain nya yang termasuk dalam *Region East Asia and Pasific* seperti Australia, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, China, Singapura, Vietnam dan New Zealand.

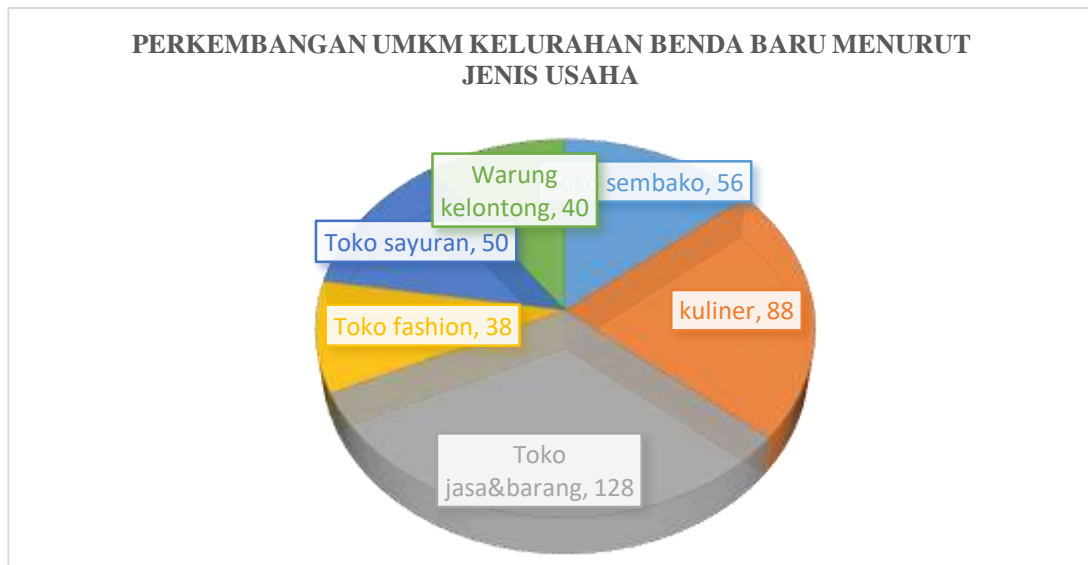
Masalah perilaku manajemen keuangan pelaku usaha adalah Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia disebabkan karena masih terdapat hambatan untuk mengakses lembaga keuangan formal. Hambatan

tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (literasi keuangan) masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan. Terutama literasi keuangan mengenai kredit membuat mereka kesulitan dalam memperoleh tambahan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pemahaman tentang lembaga keuangan adalah hal yang banyak tidak di ketahui oleh pengusaha UMKM seperti halnya kredit, banyak UMKM yang tidak berkembang karena keterbatasan modal, keterbatasan itu tidak di manfaatkan untuk meminjam uang ke bank hal itu tidak di lakukan karena rendahnya literasi keungan pelaku UMKM mengenai produk keuangan membuat hanya sedikit pelaku UMKM yang mengetahui tentang lembaga keuangan tersebut. Hal ini di karenakan mereka kurang mengerti apa itu lembaga keuangan dan apa saja jenis produk yang di tawarkan oleh lembaga tersebut

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dari delapan kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dan di resmikan sebagai daerah otonom pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan di berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2008. Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 kilometer persegi atau seluas 14.719 ha. Secara administratif kota Tangerang Selatan terdiri dari tujuh kecamatan terdiri dari 54 kelurahan dan memiliki jumlah penduduk yang relatif meningkat dari tahun ke tahun.(Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2018)

Kota Tangerang Selatan terdapat 27.000 UMKM, 60 persennya adalah kuliner yang tersebar di beberapa Kecamatan dan kelurahan.

Kelurahan Benda baru adalah sebuah kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pamulang, kelurahan ini memiliki 168 RT dan 24 RW. Jumlah UMKM kelurahan Benda baru pada tahun 2019 kurang lebih 400 UMKM yang terdaftar dalam kelurahan Benda baru, terdiri dari beberapa jenis usaha mulai dari kuliner hingga penyedia jasa layanan.



Gambar 1. Perkembangan UMKM di Benda baru

Gambar 1 menunjukkan UMKM terbanyak di Kelurahan Benda baru adalah toko barang&jasa sebanyak 128 toko, lalu usaha kuliner sebanyak 88 jenis usah di ikuti oleh toko sembako sebanyak 56 toko, toko sayur sebanyak 50 toko, warung kelontong sebanyak 40 warung, dan toko fashion sebanyak 38 toko.

Hasil pra survey terhadap 20 pelaku UMKM di wilayah kelurahan Benda baru adalah sebagai berikut :

Sumber : Pra survei determinan terhadap perilaku manajemen UMKM di kelurahan Benda baru

Hasil penelitian pra survei menunjukkan bahwa belum adanya edukasi mengenai literasi dan inklusi keuangan pada kelurahan Benda baru, pelaku UMKM telah mampu melakukan pencatatan transaksi penjualan secara sederhana. Untuk menyediakan dana darurat dan mempersiapkan dana di hari tua para pelaku UMKM memprioritas kan terlebih dahulu, dalam hal investasi mereka tidak tahu dan tidak tertarik dengan berinvestasi di pasar modal. Sedangkan untuk permasalahan permodalan dalam membangun usaha mereka lebih menggunakan uang pribadi dari pada meminjam kepada bank melalui program perbankan yaitu Laku Pandai dan

Tabel 2. Pra survei literasi dan Inklusi keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan UMKM

No	Pertanyaan	Pernah	Tidak pernah
1	Apakah pernah di lakukan literasi keuangan di kelurahan Benda baru	0	20
2	Apakah pernah di lakukan edukasi mengenai inklusi keuangan di kelurahan Benda baru	0	20
3	Saya membuat laporan keuangan sederhana secara rutin dan mencatat transaksi penjualan setiap hari	15	5
4	saya menyediakan dana darurat dan mempersiapkan dana di hari tua	20	0
5	Saya menginvestasikan uang di pasar modal	0	20
6	Saya menyimpan uang di lembaga keuangan	13	7
7	pembayaran yang sering di gunakan uang elektronik	4	16
8	apakah anda mengetahui tentang layanan perbankan laku pandai dan Kredit usaha rakyat	2	18
9	apakah anda meminjam uang di lembaga keuangan	5	15
10	informasi tentang kredit perbankan dapat di akses secara online dan dapat di pahami dengan mudah	4	16

Kredit usaha Rakyat bahkan banyak dari mereka hanya sedikit yang mengetahui akan hal itu.

Permasalahan yang di hadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai macam indikator yang mana salah satu dengan yang lain nya saling berkaitan. Diantaranya adalah Banyak pelaku UMKM yang perilaku manajemen keuangan nya masih kurang seperti tidak melakukan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan , kurang nya permodalan baik jumlah maupun sumber nya. Hal ini membuat para UMKM masih tidak mengerti mengenai pemilihan uang pribadi dan uang usahanya, ini di sebabkan dari ketidaksadaran pelaku UMKM terhadap penting nya pengelolaan keuangan usahanya. Itu menjadikan pengelolaan keuangan usaha mereka cenderung beresiko

karena sering kali pendapatan tidak sesuai pos-pos nya, dan mungkin bisa berakibat pada gagalnya kelanjutan usaha.

Terdapat banyak kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi mayoritas pelaku usaha memiliki perilaku manajemen keuangan yang buruk di sebabkan rendahnya literasi keuangan dan inklusi keuangan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut , maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Determinan Perilaku Manajemen Keuangan pada UMKM di Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah terdapat pengaruh Literasi keuangan terhadap Perilaku manajemen Keuangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Benda Baru
- b. Apakah terdapat pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Perilaku manajemen Keuangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Benda Baru

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai uraian pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Literasi keuangan terhadap Perilaku manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Benda Baru
- b. Untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Perilaku manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Benda Baru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat member manfaat, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi bagi pembaca tentang perilaku keuangan UMKM, serta dapat menjadi referensi dan tolak ukur bagi perkembangan perilaku manajemen keuangan dalam memahami lebih lanjut tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan usahanya.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipelajari dan digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang Selatan dan pengelola UMKM kecamatan Pamulang dalam membina UMKM melalui literasi dan inklusi keuangan dalam perilaku keuangan bagi pelaku UMKM.